



# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**Jl. Terpadu, No. Telp.0763 8001555 Fax. 0763 8001555**

**SELAT PANJANG**

Kode Pos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : /KPTS- DINSOS-P3AKB/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor ..... Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama perubahan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama perubahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neraga dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KKEPULAUAN MERANTI
- KESATU : Indikator kinerja utama perubahan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator kinerja utama perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021
- KETIGA : Indikator kinerja utama perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Selatpanjang  
Pada tanggal : 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**Drs. ASRORUDIN, M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19670204 199503 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Nama OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA	
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kepmenpan No. 25 Tahun 2004	Hasil survai indek kepuasan masyarakat berdasarkan kepmenpan no 25 tahun 2004	Dinsos P3AP2KB	Sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.	
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 1 Tahun 2017 tentang SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, SPM Permensos 9/ HUK/2018,	Jumlah PMKS yang tertangani	x 100	Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
					Jumlah PMKS yang ada			
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA No 2 Tahun 2011	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Lalu + Tahun Ini	x 100	Dinsos P3AP2KB	Menurut data SIMFONI PPA bahwa Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Meranti menempati Urutan ke-5 Se-Provinsi Riau
		Proporsi Perempuan	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang	Jumlah Perempuan Yang menduduki jabatan			

		yang menduduki posisi Manajerial		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Manajerial	BKD, BPS	jenjang posisi manajerial masih jauh di bawah laki-laki yaitu hanya 31%
					Jumlah Pekerja Perempuan (Usia 18 Tahun Ke atas)		
4	Menurunnya angka Kelahiran Total ( TFR )	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	RPJMN 2015 - 2019  Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tentang Renstra BKKBN 2015 - 2019	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_{if}} \times K$	Dinsos P3AP2KB, BPS, SUSENAS , SDKI, BKKBN	<p>TFR = Angka Kelahiran Total</p> <p>ASFR<sub>i</sub> = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b<sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu</p> <p>p<sub>i</sub> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</p> <p>i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49</p> <p>K = bilangan konstanta biasanya 1000</p>

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



*(Handwritten signature in blue ink)*

Drs. ASRORUDIN, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670204 199503 1 002